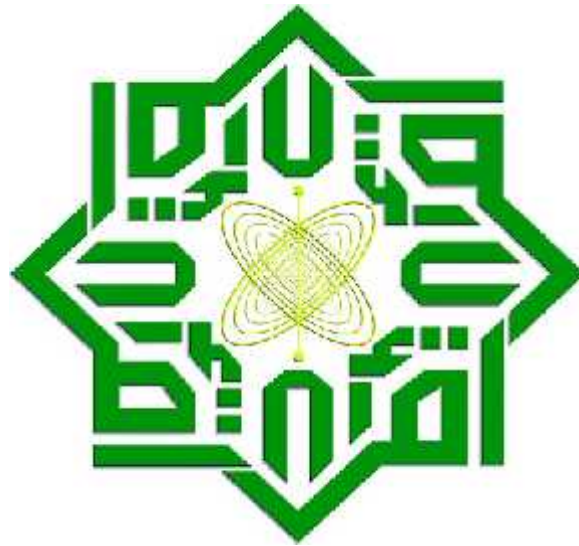


NO. 1331 / KOM-D / SD-S1 / 2012

**AKTIVITAS HUMAS DALAM MEWUJUDKAN
VISI DAN MISI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana ilmu komunikasi
di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi**



OLEH :

RINALDI
NIM : 10843001737

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1433 H/ 2012 M

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Aktivitas Humas Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Di Kepolisian Daerah Riau**”. Penelitian ini dilakukan melihat Organisasi Polri telah berkembang pesat guna dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dibidang keamanan, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Adalah menjadi kewajiban Polda memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas, fungsi serta kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Seiring dengan itu jajaran Polda juga menjadi salah satu sumber informasi penting bagi masyarakat, khususnya ditengah deras nya arus tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi.

Penelitian ini dilakukan di POLDA RIAU yang terletak di Jalan Sudirman N0.235 Pekanbaru Riau. Subjek penelitian ini adalah Kabid Humas dan seluruh Staff Humas Polda Riau. Sedangkan objek penelitian ini adalah Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Di Kepolisian Daerah Riau.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang ada dalam bidang Humas Polda Riau yaitu sebanyak 10 orang. Sedangkan data sekunder adalah dokumen dan arsip yang diperoleh dari Bidang Humas Polda Riau. Untuk mendapatkan data yang valid, dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisa data Deskriptif Kualitatif, yaitu data di jelaskan melalui pernyataan dalam bentuk kalimat tanpa melakukan uji hipotesis sehingga mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misinya memiliki berbagai kegiatan. Dapat dilihat dari sistematisnya aktivitas yang telah dibuat oleh Bidang Humas Polda Riau dan terlatihnya seluruh anggota dan staf Humas dengan baik dalam menjalankan tugasnya yang sudah ditentukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Dari segi komunikasi, yang sangat berperan dalam aktivitas Humas adalah ketika penyampaian informasi kepada publik yang didukung oleh perkembangan teknologi dan besarnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi. Dan juga dalam menjalankan hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternal demi terwujudnya Visi dan Misi Polda Riau sebagai Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL dan GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Penegasan Istilah	4
D. Permasalahan dan Batasan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Batasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfa’at Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfa’at Penelitian.....	7
F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Konsep Operasional.....	25
G. Metodologi Penelitian.....	26
1. Lokasi Penelitian	27

2. Subjek dan Objek Penelitian	27
3. Sumber Data	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisa Data	28
H. Sistematika Penulisan	30

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Polda Riau.....	31
B. Visi dan Misi Polda Riau.....	43
C. Tugas Humas Polda Riau	44
D. Kondisi Humas Polda Riau	45
1. Gambaran tentang staff / Personil Humas Polda Riau	45
2. Sarana dan Prasarana Bidang Humas Polda Riau	46
3. Pangkat-pangkat dalam Kepolisian	47
4. Struktur Organisasi Humas Polda Riau	50

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Di Kepolisian Daerah Riau	51
B. Kegiatan yang dilakukan Humas Polda Riau ynag menunjang untuk mensukseskan aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau.....	59
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau	62

1. Faktor Pendukung	62
2. Faktor Penghambat	63

BAB IV ANALISA DATA

A. Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi di Kepolisian Daerah Riau	67
B. Kegiatan yang dilakukan Humas Polda Riau yang menunjang untuk mensukseskan Aktibitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau	70
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A. TABEL

Tabel 1 Inventaris Bidang Humas Polda Riau.....	46
Tabel 2. Pangkat-pangkat dalam Kepolisian	47
Tabel 3. Data Informan Bidang Humas Polda Riau	51

B. GAMBAR

Gambar 1. Model Publik Informations	24
Gambar 2. Penerimaan Taruna Akpol	64
Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dan Supervisi di Bidang Kehumasan.....	64
Gambar 4. Kegiatan Tatap muka dan Kemitraan di kantor Riau Pos Pekanbaru	65
Gambar 5. Kegiatan Wawancara Langsung di RTV Pekanbaru.....	65
Gambar 6. Kegiatan Press Release	66
Gambar 7. Kegiatan Dokumentasi Klipping Berita.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Polri telah berkembang pesat guna dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat dibidang keamanan, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Adalah menjadi kewajiban Polda memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas, fungsi serta kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Seiring dengan itu jajaran Polda juga menjadi salah satu sumber informasi penting bagi masyarakat, khususnya ditengah derasnya arus tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi (UU No. 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik) (HTCK Humas Polda Riau, 2011 : 1).

Humas merupakan bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintah, baik yang bersifat komersial maupun yang non komersial. Apalagi perusahaan yang berskala besar sangat memerlukan Humas untuk meningkatkan atau memajukan sebuah perusahaan atau instansi, atinya : Humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan banjir informasi seperti saat ini (Anggoro, 2005: 1).

Dalam konsep Humas perlu ditegaskan mekanisme kerja dalam bentuk uraian tugas (*job description*) sehingga antara seksi yang satu dengan yang lain dan antara petugas yang satu dengan yang lain tidak terdapat tumpang tindih (*overlapping*). Penegasan mekanisme kerja tersebut amat penting karena akan jelas apa yang harus akan dikerjakan dan kepada siapa harus dipertanggung jawabkan. Tanpa uraian tugas yang jelas, sering terjadi pelemparan tanggung jawab. Apabila pekerjaan berhasil, yang berarti tujuan tercapai, cepat sekali

sebuah seksi atau seorang petugas mengklaimnya sebagai kegiatannya sendiri, sebaliknya bila gagal, gampang pula menuduh seksi lain atau orang lain sebagai penyebab kegagalan. Mekanisme kerja yang dituangkan dalam uraian tugas hendaknya disusun dengan sedemikian rupa sehingga dalam operasionalisasinya menjadi *integrative* dan *koordinatif*. Hal ini menentukan *effisien* kerja, yang berarti tujuan tercapai dengan tenaga, waktu, dan biaya yang minimal, sedangkan hasilnya diperoleh secara optimal (Onong, 2002 : 95-96).

Setiap lembaga dan organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu (*pre determine ojective*). Seberapa jauh berhasil atau tidaknya tergantung sangat dari usaha dan kemampuan pengelola instansi itu sendiri, khususnya peranan Humas juga sangat menentukan (Widjaja, 2008 : 54).

Visi merupakan suatu yang di dambakan untuk dimiliki atau diperoleh dimasa yang akan datang (*What Do They Want to Have*) sedangkan Misi adalah apa yang di dambakan untuk menjadi yang di inginkan dimasa depan (*That Whey Want to Be*). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi mutlak perlu merumuskan Misi yang akan diemban karena Misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan eksekutif di masa depan. Misi adalah maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dengan organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis (Sondang, 2005 : 43-44).

Dalam Instansi Polda Riau, yang memiliki Visi Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia. Ini merupakan suatu peran atau tanggung jawab yang cukup berat untuk dijalani sehingga para petugas khususnya bidang Humas Polda Riau memang betul-betul mengetahui uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas.

Sesuai dengan Visinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentu menjadi kewajiban Polda memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas, fungsi serta kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa instansi Polda Riau memiliki aktivitas yang memiliki tanggung jawab cukup besar sebagai anggota dibidang Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah bagaimana Aktivitas Humas Polda Riau Dalam Mewujudkan Visi dan Misinya, maka penulis dapat mengambil judul : **“AKTIVITAS HUMAS DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam pemilihan judul ini, penulis kemukakan beberapa alasan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menjadi kewajiban Polda memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas, fungsi serta kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas.
2. Mengetahui akan aktivitas yang dilakukan dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau
3. Peneliti memiliki kemampuan untuk mengkaji secara ilmiah yang didukung oleh waktu, ekonomi, keadaan lokasi penelitian dan referensi yang mendukung, serta terkait dengan jurusan yang penulis tekuni diperguruan tinggi ini, yaitu jurusan ilmu komunikasi konsentrasi Humas.

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti memberi beberapa penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu :

1. Aktivitas

Dalam kamus ilmiah populer edisi millennium, aktivitas itu adalah kegiatan ; keaktifan ; giat / tidaknya (Burhani, 2000 : 18).

Sedangkan secara umum aktivitas dapat diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem (Widjaja, 2005 : 57).

2. Humas (Hubungan Masyarakat)

Hubungan masyarakat disebut *Public Relations*, dengan ruang lingkup (Scope) kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun ke luar dan semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau organisasi (Widjaja, 2008 : 53).

3. Kepolisian Daerah (Polda) Riau

Polda Riau adalah suatu pelaksana utama pada tingkat kewilayahan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui penegakan hukum serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi (Humas Polda Riau, 2006 : 60).

4. Visi dan Misi

Visi merupakan suatu yang di dambakan untuk dimiliki atau diperoleh dimasa yang akan datang (*What Do They Want to Have*) sedangkan Misi adalah apa yang di dambakan untuk menjadi yang di inginkan dimasa depan (*That Whey Want to Be*). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi mutlak perlu merumuskan Misi yang akan diemban karena misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan eksekutif di masa depan. Misi adalah maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dengan organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis (Sondang, 2005 : 43-44).

Adapun Visi dan Misi dalam penelitian ini adalah melakukan upaya atau aktivitas yang dilakukan oleh Humas Polda Riau sehingga terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia.

D. Permasalahan dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil pokok permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Bagaimana aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau
- b) Kegiatan-kegiatan apa saja yang menunjang untuk mensukseskan aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau
- c) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan masalah dan tetap fokus dalam penelitian ini, maka penulis membatasi dengan bagaimana aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka timbul beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a) Bagaimana aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau
- b) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat suksesnya aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau.
- b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Humas Polda Riau dalam menjalankan aktivitas Humas demi tercapainya Visi dan Misi Polda Riau

2. Manfaat Penelitian

- a) Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada Polda Riau khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi penulis khususnya dan mahasiswa umumnya dibidang ilmu komunikasi.
- c) Penelitian ini bermaksud untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir perkuliahan, guna memperoleh gelar sarjana (SI) strata satu pada Jurusan Ilmu Komunikasi di UIN SUSKA RIAU.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a) Aktivitas Humas (Hubungan Masyarakat)

Aktivitas adalah kegiatan atau kesibukan, sedangkan kegiatan adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan badan untuk mencapai suatu tujuan dengan inisiatif sendiri (Poerdawadarminta, 1981: 26). Sedangkan menurut Prof. Drs. Soeganda Poerbakawatja dalam bukunya Ensiklopedi pendidikan menyatakan bahwa “aktivitas” adalah keaktifan yang berasal dari kata aktif yang berarti giat bekerja atau berusaha. Jadi aktivitas adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang dalam mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.

Seperti yang diambil dari *The British of Public Relations* yang menerangkan bahwa aktivitas Humas itu adalah mengelola kemonikasi antara organisasi dengan publiknya (Rosyadi, 2007 : 16).

Definisi Humas yang terangkum dalam kamus *fund and wagnal*, *American Standar Desk Dictionary* terbitan 1994, istilah Humas

diartikan sebagai segenap kegiatan atau aktivitas dan teknik/kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepak terjangnya. Istilah “kiat” dalam definisi ini mengindikasikan bahwa Humas harus menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan (Anggoro, 2002 : 2).

Menurut kamus terbitan *Institute Public Relations* (IPR), yakni sebuah lembaga Humas terkemuka di Inggris dan di Eropa, terbitan bulan November 1987, Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (Anggoro, 2002 : 2).

Widjaja (2002 : 57) menjelaskan bahwa aktivitas Humas sesuai dengan ruang lingkup kehumasan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data
 - a. Mengumpulkan data untuk keperluan informasi
 - b. Mengolah data
 - c. Menyajikan data hingga siap digunakan
 - d. Mengarsipkan data sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan kembali
 - e. Melayani kebutuhan data bagi yang diperlukan
 - f. Membuat kliping dari seluruh massa
- 2) Penerangan

- a. Menyebarluaskan informasi dengan jelas :
 - 1. Menyediakan dan mengumpulkan bahan informasi
 - 2. Memberikan paket informasi
 - 3. Memberikan bahan berita (*release*)
- b. Mengadakan hubungan dengan media massa
 - 1. Menyiapkan baik lewat pers maupun TVRI / RRI yang berbentuk berita, wawancara, varia pendidikan, dinamika pembangunan, siaran pedesaan, apresiasi budaya, dan lain-lain
 - 2. Mengadakan konferensi pers
 - 3. Mengatur wawancara langsung antara pejabat dengan para wartawan
- c. Mengadakan pemberian kehumasan berupa :
 - 1. Mengadakan temu karya
 - 2. Mengadakan temu karya antara wartawan dengan pejabat
- d. Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi photo, rekaman pidato, film *movie*, sambutan – sambutan, siaran TVRI dalam bentuk *video*
- e. Menyelenggarakan pameran
- f. Memberikan pelayanan informasi dengan menyajikan berita – berita dan kliping
- g. Mentranskrip pidato dan mengarsipkannya
- h. Mengalbumkan photo – photo kegiatan

- i. Mengikuti kunjungan kerja pejabat / pimpinan
- j. Mengadakan wisata pers (*pers tour*) ke objek yang telah ditentukan

3) Publikasi

- a. Menerbitkan warta harian, mingguan, majalah bulanan, dan folder (*leaflet*).
- b. Menerbitkan buku kerja
- c. Menerbitkan kalender kerja
- d. Ikut serta menyelenggarakan pameran

b) Ciri dan Fungsi Humas

Berfungsi – tidaknya Humas dalam sebuah organisasi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik
- 2) Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi
- 3) Publik yang menjadi sasaran kegiatan Humas adalah publik *ekstern* dan publik *intern*
- 4) Oprasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologi, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik (Onong, 2002 : 24).

Di samping itu juga kerja sama dengan pers juga akan menghasilkan frekuensi publisitas yang cukup tinggi. Dampak pemberitaan tersebut baik yang bersifat *stimultaneity effect* (efek keserempakan), efek dramatisir, atau efek publisitas tinggi, dan memiliki pengaruh yang luar biasa besarnya terhadap pembentukan opini publik dalam waktu yang relatif singkat, sehubungan dengan jumlah pembaca atau audiensi yang tersebar diberbagai tempat atau kawasan dalam waktu bersamaan (Rosyadi, 2007 : 167-168).

Apa yang dikemukakan oleh H. Fayol beberapa kegiatan dan sasaran Humas sebagai berikut

- a) Membangun identitas dan Citra Organisasi (*building corporate identity and image*)
 - 1) Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif
 - 2) Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai pihak
- b) Menghadapi Krisis (*Facing of Criss*)
 - 1) Menangani keluhan (*complaint*) dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis
- c) Mempromosikan aspek kemasyarakatan (*Promotions Public Causes*)
 - 1) Mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik
 - 2) Mendukung kegiatan kampanye sosial anti merokok, serta menghindari obat-obatan terlarang, dan sebagainya (Rosyadi, 2007 : 23-24).

Menurut Farank Jefkins (1988 : 154), mengatakan, terdapat lima model utama mengenai media internal organisasi atau perusahaan (*House Journal*) yaitu

- a) *The Sales Bulletin*, merupakan bentuk media komunikasi regular antara manajer penjualan dengan salesmen yang berada di lapangan, dan biasanya diterbitkan secara mingguan.
- b) *The Newsletter*, merupakan media informasi atau siaran berita yang singkat, ditujukan kepada para pembaca yang sibuk atau tidak memiliki waktu yang banyak untuk membaca berita yang terlalu panjang dan rinci.
- c) *The Magazine*, suatu bentuk majalah yang berisikan tulisan, feature, artikel, gambar-gambar dan biasanya diterbitkan berkala secara bulanan atau triwulanan.
- d) *The Tabloid Newspaper*, yaitu media yang mirip dengan surat kabar populer dan berisikan berita-berita pokok, artikel populer yang pendek dan dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi yang menarik pembaca. Biasanya diterbitkan berkala secara bulanan atau dwibulanan.
- e) *The Wall Newspaper*, merupakan bentuk media yang sering dipergunakan sebagai media komunikasi internal antar karyawan di sebuah perusahaan besar, pabrik, pusat pertokoan dan hingga rumah sakit (Rosyadi, 2007 : 196).

Dalam aktivitas Humas untuk mempublikasikan informasi melalui media internal bisa sebagai dokumentasi yang merupakan salah satu kegiatan Humas yang berkaitan dengan menelaah, menganalisis dan kemudian mengevaluasi perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan atau lembaga, aktivitas-aktivitas Humas yang telah dimuat atau dipublikasikan diberbagai media massa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja Humas berikutnya (Rosyadi, 2007 : 227).

Adapun kegiatan Humas berupa penerbitan *Press Release* dan *Jumpa Pers* ini bertujuan untuk :

- a) Untuk memberikan suatu informasi, berita, publikasi dan promosi, dan aktivitas Humas yang dianggap penting untuk diketahui secara luas oleh publik sasaran, yaitu yang menonjolkan segi pengenalan (*awareness aspect*)
- b) Menjelaskan suatu peristiwa yang mungkin atau yang telah terjadi. Dan salah satu cara Humas menjelaskannya kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan pihak *Pers* / wartawan. Diharapkan penjelasan melalui media massa tersebut akan muncul saling pengertian dan saling menghargai (*mutual understanding and appreciation aspect*) di masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Dapat juga untuk meluruskan atau sekaligus untuk membantah tentang suatu berita negatif yang telah tersiar di media massa (*make something to clear and objective*) (Rosyadi, 2007 : 187-188). yang menjadi pertanyaan sejauh mana kepentingan atau untuk apakah konferensi *Pers* itu diselenggarakan oleh pihak Humas bersangkutan, jawabannya sebagai tolok ukur pihak Humas yang berkepentingan mengadakan jumpa *Pers* tersebut adalah menggunakan formula 5W+1H sebagai berikut :

- a) *What* : apa yang menjadi tujuan, topik atau tema dan isu apa yang ingin ditampilkan, serta kepentingan apa yang ingin ditonjolkan, dan reaksi apa yang diharapkan dari hasil jumpa pers tersebut di masa-masa yang akan datang.

b) *Who* : kemudian siapa yang ditunjuk sebagai nara sumbernya (jubir), pembicara, staf ahli sebagai pendampingnya, siapa dan berapa jumlah wartawan, atau media bagaimana yang akan diundang dalam jumpa pers tersebut. Ingat, tidak semua pejabat instansi atau pimpinan perusahaan yang mampu berbicara atau siap untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang kadang-kadang cukup kritis dan sensitif itu, salah bicara atau keliru dalam mengeluarkan pernyataan (*statement*) bisa menimbulkan “masalah baru” ketika disiarkan ke berbagai media massa. Sebaiknya dikoordiansikan dahulu tema, topik, dan kesatuan pendapat diantara para nara sumber, serta pembicara. Kemudian sesuaikan : *press stetmennya*” dengan bidang keahliannya masing-masing pembicara ketika akan menjawab pertanyaan dari pihak pers bersangkutan yang hadir pada jumpa pers itu.

c) *Where and When* : dalam undangan jumpa pers, harus jelas perencanaan dan rinci mengenai di mana tempatnya, kapan tanggal dan waktu perencanaan jumpa pers tersebut berlangsung. Jangan lupa dalam undangan jumpa pers tertera secara lengkap, nama, alamat, telepon, dan perusahaan sebagai tuan rumah.

Menurut pengalaman, biasanya wartawan yang akan diundang memiliki waktu yang terbatas untuk dapat hadir pada jumpa pers tersebut. Oleh karena itu, pihak Humas harus sering mengadakan saling kontak serta konfirmasi sebelum menjelang hari “H”.

d) *Why* : Mengapa, dan ada atau tidaknya relevansi kepentingan tertentu di Humas? Dalam rangka apa, dan cukup seriuskah masalahnya? Apakah jumpa pers tersebut hanya berkaitan dengan kepentingan pemberitaan, publikasi, serta promosi produk, atau aktivitas tertentu?. Atau bertujuan menetralkan suatu berita atau isu negatif yang tengah beredar di masyarakat? Dan cukup efektifkah kalau semua itu bisa diselesaikan hanya dengan jumpa pers?.

e) *How* : mencari bagaimana tentang persiapan dan hasil jumpa pers

1) persiapan dan perencanaan jumpa pers, yaitu mengenai info kit, *press release*, *speech writing*, anggaran (dana) yang berkaitan dengan dan jumpa pers, konfirmasi kesediaan wartawan yang akan datang, kemudian berapa jumlah media cetak atau

elektronik yang akan diundang pada jumpa pers tersebut dan sebagainya. Apa semua itu sudah siap?

2) Pelaksanaan (action plan)

Dukungan penuh dari pihak manajemen, keuangan dan sebagainya, siapa sebagai jubir, pemandu, bagaimana *sound system* ruang knferensi, slide film, OHP (*head projector*), *video cassets* dan televise, tape recorder, info kit dan sebagainya. Status konfirmasi kesediaan pers / wartawan untuk datang ke jumpa pers, yang berasal dari media cetak dan elektronik dan sebagainya dianggap perlu sebagaipengecekan terakhir (konfirmasi kehadiran) menjelang hari 'H'.

3) Evaluasi

Setelah mengadakan jumpa pers, sebagai tolok ukur keberhasilan atau tidaknya maka Humas mengecek sejauh mana hasil, kualitas dan kuantitas pemuatan berita di media cetak atau penayangan di media saluran stasiun TV dan radio. Seandainya pemuata atau penayangan hasil jumpa pers itu mencapai 75

% ke atas, berarti mencapai sasaran dan berhasil. Sebaliknya kalau jumpa per situ dilput oleh wartawan kurang dari 50 % berarti pihak Humas gagal mengadakan konferensi persnya, artinya : *something wrong in dealing with human relations and as bad press relationship* (Rosady, 2007 : 187-190).

Humas juga mempunyai aktivitas membangun kemitraan di bidang Humas Polda Riau itu tidak terlepas kepada hal yang berhubungan dengan citra organisasi. Kerena penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik dan menguntungkan terhadap suatu citra lembaga / organisasi atau produk barang dan jasa pelayanannya yang diwakili oleh pihak Humas / PR. Biasanya landasan citra itu berakar dari “nilai-nilai kepercayaan” yang kongkretnya diberikan secara individual, dan merupakan pandangan atau persepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas, yaitu sering dinamakan citra (Rosyadi, 2007 : 75-77).

Bahwa suatu perkembangan penting dalam hubungan masyarakat terjadi dalam hubungan yang lebih erat antara perusahaan, asosiasi, dan perserikatan dengan pemerintah dan keterlibatan yang lebih besar dari lembaga-lembaga swasta dalam permasalahan masyarakat. Kepentingan

organisasi dan pemerintah menjadi satu dengan keuntungan mereka, dan suatu organisasi tidak menganggap pemerintah sebagai lawan tetapi sebagai mitra kerja (Farazier, 1988 : 113).

Humas itu memiliki hubungan dengan komunitas. Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun temurun. Orang –orang yang hidup dalam komunitas dan lembaga-lembaganya membuat mereka saling bergantung satu dengan lainnya. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang baik tanpa lembaga-lembaga tersebut begitu juga sebaliknya (Farazier, 1988 : 65).

Mengenai konsep fungsional Humas, Scott M.Cutlip dan Allen Center dalam bukunya, *Effective Public Relations*, memberikan penjelasan sebagai berikut :

- 1) *To facilitate and insure an inflow of representative opinions from an organization's several publics so that its policies and operations may be kept compatible with the diverse needs and views of the public* (memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut).
- 2) *To counsel management on ways and means on shaping an organization's policies and operation's to gain maximum public*

acceptance (menasihati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik.

- 5) *To devise and implement program that will gain wide and favorable interpretations of an organization's policies and operations* (merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operational organisasi (Onong, 2002 : 34).

Yang dimaksud dengan fungsi Humas dalam penelitian ini adalah melakukan segala aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan kehumasan sehingga aktivitas tersebut bisa berjalan dengan kebijaksanaan yang diperbuat dan sesuai dengan harapan yakni harapan dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau.

c) Tujuan dan sasaran Hubungan Masyarakat

Tujuan sentral yang akan dicapai adalah tujuan organisasi, sebab Humas dibentuk atau digiatkan guna menunjang manajemen yang berupaya mencapai tujuan organisasi. Organisasi adalah kerangka kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan kegiatan itu adalah pengarahan manusia-manusia secara terarah yang dinamakan manajemen. Jelasnya, organisasi merupakan “Raga”, dan manajemen adalah “Jiwa”. Organisasi tanpa manajemen dapat diibaratkan raga tanpa jiwa, jadi organisasi yang demikian tidak berfungsi, juga sebaliknya.

Tujuan dan sasaran erat sekali hubungannya. Tujuan bersifat kualitatif abstrak, sasaran kuantitatif kongkret. Dalam konsepnya, Humas perlu mencantumkan dengan jelas siapa saja publik yang menjadi sasaran. Suatu organisasi mempunyai publik ekstern yang berbeda dengan organisasi lainnya, misalnya, publik sebuah perusahaan berbeda dengan publik universitas, sebab sifat organisasi tersebut berbeda.

Juga yang tidak boleh luput dari perhatian adalah factor *men*, petugas yang sesuai dengan kepakarannya. Di Humas organisasi-organisasi besar terdapat redaktur *Press Release*, redaktur majalah organisasi, redaktur grafis, juru photo, juru kamera video, juru kamera film, penulis pidato, peneliti, juru klipping, petugas meja informasi, dan lain-lain (Onong, 2002 : 94-95).

d) Perumusan Misi

Dalam perumusan Visi dan Misi organisasi, paling tidak ada beberapa hal yang akan dicapai oleh Humas adalah sebagai berikut :

- 1). Dengan rumusan misi yang tepat, dikalangan para anggota organisasi terdapat persamaan persepsi tentang maksud keberadaan organisasi yang bersangkutan. Kesamaan persepsi demikian menjadi sangat penting karena akan berakibat pada kesamaan gerak dan tindakan dalam memikul tanggung jawab masing-masing, meskipun bergerak pada kegiatan yang sifatnya spesialisik.

- 2). Dengan rumusan misi yang baik, dasar kuat diletakkan untuk motivasi penggunaan sumber daya, sarana, prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh organisasi secara efisien dan efektif.
- 3). Dengan rumusan misi, seyogianya tergambar skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan strategi.
- 4). Dengan rumusan misi yang baik, sudah harus terdapat petunjuk tentang iklim organisasi yang bagaimana akan ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara dalam organisasi. Misalnya, iklim kebersamaan, kekeluargaan dan lain sebagainya.
- 5). Misi yang dirumuskan dan proyeksi secara tepat akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mempunyai wawasan yang sama dengan manajemen organisasi sebagai bahan pertimbangan meniti karier. Artinya, misi demikian akan mempunyai daya tarik bagi orang – orang tertentu untuk bergabung dengan organisasi.
- 6). Misi bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, karena ia digali dari tujuan yang ingin dicapai dan diikuti oleh berbagai langkah dalam proses manajemen strategi. Oleh karena itu sangat penting bagi perumus misi untuk memperhatikan bahwa misi tersebut harus mempermudah upaya menerjemahkan tujuan dan berbagai sasaran ke dalam struktur pekerjaan.

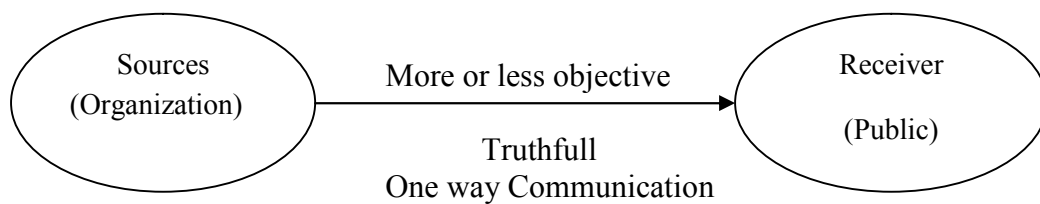
Artinya, rumusan misi harus mempermudah pemilihan dan penggunaan type dan struktur organisasi tertentu yang pada gilirannya menggambarkan berbagai hal, seperti :

1. Besaran organisasi yang tepat
 2. Pembagian tugas yang jelas
 3. Penciptaan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab
 4. Pola sentralisasi *versus* desentralisasi dalam pengambilan keputusan
 5. Kesatuan arah
 6. Rentang kendali
 7. Diversifikasi *versus* konsentrasi
 8. Jenis teknologi yang akan dimanfaatkan
 9. Bentuk – bentuk spesialisasi pengetahuan dan keterampilan para anggota organisasi.
- 7). Misi yang dirumuskan dengan tepat mengidentifikasikan secara umum hal-hal yang ingin dicapai dan memungkinkan penerjemahan hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga operasionalisasi berbagai kegiatan dan hasilnya dapat diukur dan dikendalikan berdasarkan berbagai kriteria biaya, waktu, tenaga dan sarana serta prasarana yang dimanfaatkan (Scoot, 2006 : 23 – 24).

Adapun model komunikasi dalam penelitian ini adalah *Model Public Informations*

Gambar 1.

Model Publik Informations



(Sumber : Rosyadi, 2003 : 103-104).

Dalam model ini, Humas bertindak seolah-olah sebagai “journalis in resident”. Berupaya membangun kepercayaan organisasi melalui proses komunikasi searah (*one way process*) dan tidak mementingkan persuasui. Seolah-olah bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan publisitas, informasi dan berita ke publik. Di samping itu mampu mengendalikan berita melalui bekerja sama dengan media massa. Unsur kebenaran dan objektivitas pesan (informasi) selalu diperhatikan oleh pihak nara sumbernya (Rosyadi, 2003 : 103-104).

Sesuai dengan penelitian ini bahwa Humas Polda Riau dalam penyampaian informasi kepada publik dengan menggunakan media yang ada di Riau. Dimana kerjasama atau hubungan baik yang sudah dijalin dengan pemilik media tersebut.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan sebagai acuan dalam menerapkan konsep teoritis di lapangan sehingga bisa menjadi tolok ukur untuk penelitian yang dilakukan. Dari teori yang sudah dikemukakan di atas, dapat di operasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Adanya sosialisasi kegiatan Polda Riau kepada masyarakat melalui beberapa media cetak atau media elektronik. Seperti : berlangganan dengan Riau Pos, Pekanbaru MX, Pekanbaru Tribun, Metro Riau, dan Haluan Riau
- b. Adanya kegiatan Polda Riau dari bidang penerangan satuan dalam pembuatan laflet dan booklet yaitu penyampaian informasi melalui media tulisan atau gambar yang berisi undang-undang, peraturan, kebijakan, petunjuk, perintah untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh pembaca baik internal Polri maupun masyarakat.
- c. Menyusun *Press Release* yang diberikan kepada media massa disampaikan dalam bentuk tertulis.
- d. Penerbitan media komunikasi internal yang dikhususkan penyampaian informasi kepada anggota Polri secara tertulis (cetak) dan didukung dengan dokumentasi yang berisi undang-undang, peraturan, kebijakan, petunjuk, perintah pimpinan Polri maupun kegiatan-kegiatan Polri untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh anggota Polri.
- e. Dari bidang membangun kemitraan Humas melakukan badan koordinasi kehumasan. Yakni salah satu bentuk pertemuan kehumasan lembaga

pemerintah yang melaksanakan kegiatan koordinasi secara rutin untuk saling menyampaikan pesan maupun informasi.

- f. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, yakni kegiatan yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepakatan antara Polri dengan instansi pemerintah dalam setiap bentuk kegiatan yang saling memberikan keuntungan dan dalam meningkatkan image polri kearah yang lebih baik.
- g. Melakukan kerjasama dengan tokoh (masyarakat, agama, pemuda, intelektual dan lain-lain). Yakni dalam setiap bentuk kegiatan yang saling memberikan keuntungan dan dalam meningkatkan image polri kearah yang lebih baik.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan *Deskriptif Kualitatif* sebagai teknik analisa data. Yakni data yang diperoleh dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan dengan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan (Ari Kunto, 1998 : 245).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di POLDA RIAU yang terletak di Jalan Sudirman N0. 235 Pekanbaru Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kabid Humas dan seluruh Staff Humas Polda Riau.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Di Kepolisian Daerah Riau.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik perorangan, kelompok, maupun organisasi (Rosady, 2010 : 15).

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kabid dan Staff Humas Polda Riau yang berjumlah 22 orang.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang akan dilakukan penulis sewaktu penelitian sebagai bahan pelengkap penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada bagian Humas Polda Riau.

b. Observasi

Pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi riil yang terjadi dan ada pada bagian Humas Polda Riau.

c. Dokumentasi

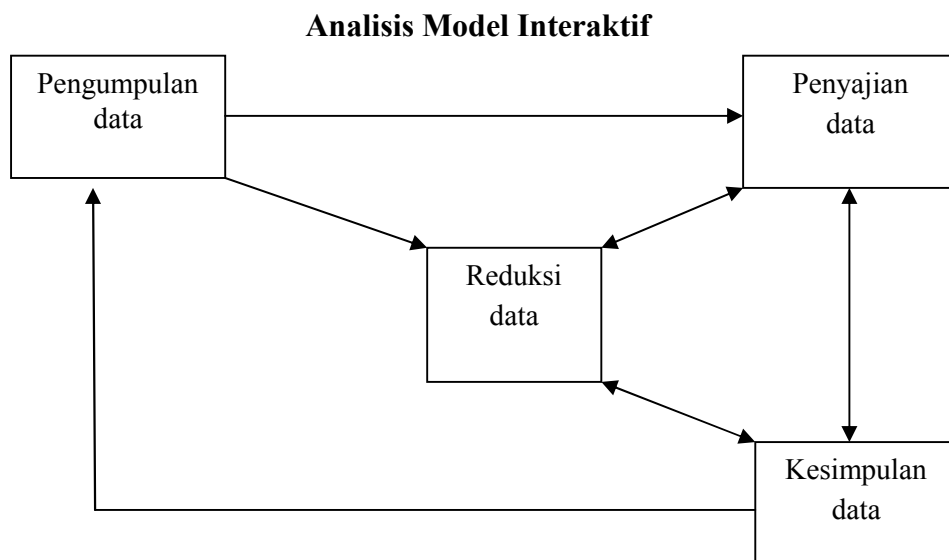
Dilakukan untuk memberi landasan teoritis sebagai acuan penelitian. Yaitu dengan mempelajari buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Ari Kunto, 1998 : 149).

5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan tidak digunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Analisis data menurut patton (dalam Bungin, 2003 : 65). Adalah proses mengatur urutan data, menorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar dan membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi.

Berdasarkan pengertian analisis data tersebut, maka data diolah menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diuraikan dengan pedoman kepada landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu data model interaktif Huberman dan Miles :

Gambar 2.



Sumber : Milles dan Huberman (dalam Bungin, 2003 : 68)

Teknis analisa data model interaktif menurut Huberman dan Milles ini menunjukkan adanya sifat interaktif antara kolektif data atau pengumpulan data dan analisis data. Analisis data yang dimaksudkan yaitur reduksi data, penyajian data verifikasi data penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah mengelolah data dengan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan serta mengorganisir data tersebut. Dengan menngorganisir data, maka dapat dengan mudah menyajikan

atau memaparkan data-data yang diperlukan yang disimpulkan dengan cara induktif pada penelitian, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi dalam menganalisis data penelitian (dalam Bungin, 2003 : 69).

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, rujukan penelitian yang berkaitan, konsep operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN, Berisikan tentang gambaran umum POLDA RIAU.

BAB III : PENYAJIAN DATA, Berisikan tentang data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan judul penelitian.

BAB IV : ANALISA DATA, Berisikan bagaimana aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau.

BAB V : PENUTUP, Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. SEJARAH POLDA RIAU

1. Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra – putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “Mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak - gerik para pimpinan kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra – putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

2. Pengibaran Merah Putih Di Pekanbaru

Di masa penjajahan Jepang, kepolisian di Pekanbaru dikuasai oleh Militer *Dai Nippon*. Kepolisian yang saat itu dipimpin oleh *Keibuho Toegimin* memperhatikan gerak – gerik yang dilakukan oleh militer Jepang. Mereka nampak sangat sibuk mengemasi barang – barang yang mencerminkan akan melakukan suatu pemindahan. Melihat situasi ini, *Keibuho Toegimin* memberanikan diri bertanya kepada Polisi “Uno”, apa sebenarnya yang terjadi. (Keibu adalah pangkat Polisi Jepang yang setara dengan Inspektur, Ho setara pembantu / Ajun, Keibuho adalah pembantu Inspektur Polisi). Dengan jujur kepala kepolisian Jepang itu mengatakan pihaknya akan berperang dengan tentara Sekutu.

Berita Proklamasi Kemerdekaan RI sendiri baru sampai di Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 1945. Sekaligus diperoleh kepastian tentang telah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, yaitu peperangan antara Jepang dengan Sekutu, dimana Jepang menyerah kalah terhadap Sekutu setelah *Hiroshima* dan *Nagasaki* dijatuhi bom atom. Kepastian tersebut diketahui melalui Radio Bukittinggi. Oleh pemancar Radio tersebut, disiarkan berita tentang perang Asia Timur telah berakhir, kemudian disusul dengan pidato *Mohd Syafei* selaku Ketua Sumataro Chuo Sangi In, yang menyatakan bahwa antara Jepang dengan Negara – Negara Sekutu telah tercapai perdamaian. Setelah menyiarkan berita – berita dan pidato tersebut, pemancar radio itu tidak menyiarkan berita – berita lagi. Artinya mulai saat itu, pemancar radio tersebut menghentikan kegiatannya.

Keesokan harinya, 22 Agustus 1945, *Keibuho Toegimin* mendapat kabar bahwa salah seorang pegawai PTT telah mendengar berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berita tersebut oleh **Basjruul Jamal** dan kawan – kawannya disampaikan kepada para pemimpin bangsa Indonesia yang berada di Pekanbaru dan mendesak untuk dapat bertindak serta bergerak sesuai dengan maksud Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tapi karena tentara Jepang masih berada di Pekanbaru dan masih mengadakan tekanan – tekanan dan pengawasan, maka pemimpin – pemimpin bangsa Indonesia tidak dapat berbuat apa – apa. Sehingga pemuda – pemuda PTT, yang telah menyusun diri dalam Angkatan Muda PTT, mengadakan pemogokan. Mereka tidak mau bekerja dan melaksanakan perintah – perintah atasannya yang masih berkebangsaan Jepang. Tindakan itu merupakan protes kepada kepala PTT.

Akibatnya, Suasana kota Pekanbaru menjadi tegang. Kompetai Jepang menangkap dua pemuda bekas Gyu Gun yang datang dari Bukit Tinggi, untuk menyebarkan selebaran teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selebaran itu ditempelkan disetiap toko dan rumah – rumah penduduk. Dengan demikian pemimpin – pemimpin dan rakyat Indonesia di Pekanbaru telah mengetahui dengan pasti tentang kemerdekaan Indonesia. Kedua pemuda bekas Gyu Gun itu bernama *Rajab* dan *Nur Rauf*. Setelah diperiksa, mereka diperintahkan meninggalkan Pekanbaru untuk kembali ke Bukit Tinggi.

Disisi lain Angkatan Muda PTT melangkah lebih maju. Mereka mengadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih di kantor PTT. Pengibaran bendera itu dipimpin oleh Basjru' Jamal dan Abuslim. Tiang benderanya terletak di atap kantor PTT (sekarang menjadi kantor PU Provinsi Riau). Karena tali penggerak bendera tidak ada, maka sebelum upacara dimulai Danielsyah harus naik ke atas atap sambil melepaskan selubung bendera, Angkatan Muda PTT mengiringinya dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sebelum upacara tersebut dilakukan, *Keibuho Toegimin* telah mendengarkan informasinya, sehingga ia menyatakan bahwa pihak kepolisian dipekanbaru mendukung perjuangan Angkatan Muda PTT itu dan akan turut menghadirinya. Setelah upacara pengibaran Bendera Merah Putih selesai, *Keibuho Toegimin* mengadakan perundingan dengan sejumlah anggota kepolisian, antara lain dengan **Junsa** (junsa = agen polisi, bucho = Kepala Bagian. Junsa dimasukkan agen polisi kepala). Seperti Junsa Bucho Amir Husin Atan, Misman, Margo, dan lainnya. Isinya, tentang kemungkinan mengibarkan Bendera Merah Putih di

markas Kepolisian di Pekanbaru. Untuk maksud tersebut dicari dukungan dari kalangan Pemuda dan anggota kepolisian lainnya. Ternyata sebahagian besar berpihak kepada Republik Indonesia dan bersedia mengikuti jejak langkah *Keibuho Toegimin* . jadi, setelah selesai upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di kantor Polisi (sekarang markas Polresta Pekanbaru). Seluruh lapisan masyarakat pekanbaru merasa bergembira dan bersuka ria menyambut berita yang telah lama menjadi cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Sekalipun tentara jepang masih berkeliaran mereka sudah tidak berdaya lagi, segala tingkah laku masyarakat, sudah tidak menjadi perhatiannya lagi. Sehingga pagi 16 September 1945, masyarakat Pekanbaru datang beramai-ramai kehalaman kantor Syu Chokan (Residen) Riau.

Dihadapan seluruh rakyat, dengan iringan lagu Indonesia Raya dikibarkanlah bendera Merah Putih. Selesai upacara pengibaran, dua tokoh masyarakat, *Raden Yusuf Surya Atmaja* dan *Bustamam* dari pengadilan Negeri Pekanbaru berpidato dihadapan seluruh masyarakat, untuk mendukung perjuangan **Socakrno-Hatta** pada hari yang sama mendaratnya *Lady Mounbatten* dan sejumlah opsir (perwira) sekutu, untuk melihat tawanan perang berkebangsaan Inggris, Australia dan Belanda. Tentara sekutu yang baru saja mendarat itu langsung membebaskan para tawanan perang Jepang di KM. 4 Tangkerang. Keadaan fisik tawanan perang itu sangat menyedihkan, sebab, selama menjadi tawanan tentara Jepang, mereka harus bekerja keras membuat jalan kereta api yang menghubungkan Pekanbaru dengan Muaro / Sijunjung di Sumatera Barat. Para tawanan berkebangsaan Inggris dan Australia kemudian diangkut ke Singapura, sedangkan yang berkebangsaan

Belanda tetap tinggal di Pekanbaru. Mereka bersorak – sorai saat memasuki kota. Sebagian berusaha mengambil alih kekuasaan pemerintah dari tangan bangsa Indonesia.

Di kantor Polisi Pekanbaru, bekas tawanan dari kalangan Polisi Belanda mengambil alih kekuasaan dari tangan Kepala Polisi “**Uno**” berkebangsaan Jepang. Kemudian dikibarkanlah bendera Belanda. Peristiwa tersebut segera menimbulkan reaksi dari *Keibuho Toegimin* yang memerintahkan kepada Junsu Bucho Margo untuk menurunkannya. Setelah merobek warna birunya, bendera tersebut dikibarkannya kembali. Peristiwa ini tidak menimbulkan insiden yang berarti dari kalangan Kepolisian yang Pro kepada Belanda, yang dipimpin oleh *Keibuho Tkdare*. Sejak 17 September 1945, bendera Merah Putih tetap berkibar di kantor Polisi Pekanbaru.

Sementara anggota Polisi yang berpihak kepada Belanda berangkat ke Setanun. Mereka berkumpul bersama-sama dengan tawanan perang berkebangsaan Belanda. Sehingga yang tinggal di Pekanbaru hanyalah para Polisi yang berpihak dan bersedia berjuang menegakkan serta mempertahankan Negara Republik Indonesia.

3. Lahirnya Kepolisian Komisaris Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 1958. Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dan Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara

berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi “Tigas” dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

Sementara waktu itu Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang dipimpin oleh komisaris Polisi Tingkat I R. *Moedjoko*, Kepolisian komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota praja Pekanbaru, Polres Indragiri bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958 ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan Kepolisian” terhadap Komando operasi Militer di daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota Polisi yang berada di daerah Riau. Setelah dibentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisian Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan Logistik dan perumahan, Kantor pun harus menumpang pada Polisi Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para Polisi yang datang dari luar daerah, Kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah Kopel, yang kemudian dikenal sebagai Mess I dan Mess II. Dengan keluarnya otorisasi *Noodinkwartering* tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan. Berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruang untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan para kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1958 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des /52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swantara tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan perantaraannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan ibu kota Provinsi Riau

tersebut keluarlah Surat Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia inter departemental dibentuk. Pada tingkat pusat diketahui Sekjen Kementrian Dalam Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan Lautan masing-masing diketuai oleh Peperda dan KDMR (Peperda = Penguasa Perang Daerah, KDMR = Komando Daerah Maritime Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi Kbupaten Kampar KP Tk *I R Rochjat Winatakusuma*, untuk duduk dalam kepanitiaan interdepartemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitia tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau daratan yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap ke dua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol' R Sadikum KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan November 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 orang, dan tahap ketiga 7 orang. Meski demikian Polisi Komisariat Riau tetap memiliki dua kantor, di Pekanbaru dan di Tanjung pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima / meneruskan surat-surat yang sifatnya

prinsifil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Baru akhir tahun 1960 hampir semua kegiatan kepolisian Komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang, sebab itu jabatan-jabatan coordinator kepolisian Daerah Riau Daratan dan perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkat dengan Kapal Laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai. Akibatnya, kantor dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi, kantor kepolisian Komisariat Riau terpencar di tempat-tempat KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan III menempati kantor yang diperuntukkan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A. Yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor Gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl. Rintis. Kabag VI dan kepala Bagian Keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpencar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian Komisariat Riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanen. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian Komisariat dipindahkan ke bangunan

yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Provinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada ditempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan Perintis untuk setiap Polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Provinsi Riau yang luasnya 94,562 km², dengan penduduknya berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari empat Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

LAHIRNYA PATAKA “TUAH SAKTI HAMBA NEGERI”

Setelah 12 tahun menyandang kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerh pataka yang bernama “Tuah Sakti Hamba Negeri” pemberian ini berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 Februari 1970. Pataka “Tuah Sakti Hamba Negeri” diciptakan OK Nazami Jamil (sekarang kepala Bidang Kebudayaan Kanwil DepDikBud Provinsi Riau), yang mempunyai arti sebagai berikut :

a. Tuah

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang diluar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluknya. Seorang memiliki Tuah, atau apa yang diartikan “orang bertuah” adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang yang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke – Sakti – an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-Sakti-an ini dapat diperoleh dengan jalan (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal, kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

c. Hamba Negeri

Dapat diartikan sebagai Abdi dari tanah air, Abdi dari pada Nusa dan Bangsa.

Arti keseluruhan adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki TUAH dan ke- SAKTI –an yang diperolehnya baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara, Rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-SAKTI –an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, TUAH SAKTI HAMBA NEGERI , adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai –nilai falsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksmanah Hangtuah, dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : “untuk apa mencari TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi Negeri ?”. TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada Negeri, kepada nusa dan bangsa.

Upacara penganugrahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan Hangtuah Pekanbaru, bertepatan dengan Trio Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1970. Pada upacara tersebut Kapolri

Komisaris Jendral Polisi Drs. Hoegeng diwakili oleh Korandak I / Sumatera, Irjen Pol Drs. Murhadi Danuwilogo menganugrahkan Pataka kepada Pangdak IV / Riau *Kombes Pol Drs R Achmad Mauludin.*

Riau daratan dan pulau-pulau terletak disepanjang pantai Timur Sumatera digabungkan ke dalam Riau Syu dengan ibukotanya Pekanbaru. Sedangkan kepulauan Riau menjadi bagian utama Singapura. Saat itu para Raja, terutama yang dianggap Militer Jepang berpengaruh kepada rakyat, langsung ditangkap dan ditawan. Sebagian ada yang meninggal akibat siksaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, selama dalam masa revolusi fisik, Daerah Riau menjadi suatu bagian dari provinsi sumatera dan Gubernurnya dijabat Mr. T. Mohd Hasan. Kemudian Provinsi sumatera dihapuskan dan dibagi tiga Provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Status Keresidenan Riau dihapuskan dan Kabupaten-Kabupaten yang ada langsung berada di bawah Gubernur Sumatera Tengah, yang berkedudukan di Bukittingi. Penetapan ini tertuang dalam Undang-undang No. 10/tahun 1984 dan Undang-undang No. 22 tahun 1984.

Setelah adanya desakan masyarakat, akhirnya Sumatera Timur dan Tapannuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Provinsi riau sendiri dibentuk dengan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang No 16 tahun 1958.

B. VISI DAN MISI KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetya sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBA NEGERI”.

VISI POLDA RIAU

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia

MISI POLDA RIAU

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventive
3. Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia
4. Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma .
5. Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji

C. TUGAS HUMAS POLDA RIAU

Humas Polda Riau, dalam melaksanakan fungsinya ada beberapa Sub bagian yang mempunyai tugas dan wewenang memperlancar kegiatan Humas diantaranya dalam tugas dan *Job Descriptions* bidang Humas :

JOB DISCRPTION BID HUMAS

1. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda Riau.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas :
 - a. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi serta kerjasama dan kemitraan pengumpulan dengan media masa berikut komponennya
 - b. Pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polda;
 - c. Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri;
 - d. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan daam dan pengurusan personil dan logistik di lingkungan Bid Humas
 - e. Pemantaun dan evaluasi kegiatan program Bid Humas.
3. Dalam pelaksanaan tugas Kabid Humas dibantu :
 - a. Kasubbid Renmin;

Kasubbag Renmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, Personil dan Kinerja, pelayanan

ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan dilingkungan Bid Humas Polda Riau.

b. Kasubbid Penmas;

Kasubbag Penmas bertugas menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi termasuk kerjasama dan kemitraan dengan media masa

c. Kasubbid PID

Kasubbid PID melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi, melakukan anev kegiatan tugas Bid Humas Polda Riau.

D. KONDISI HUMAS POLDA RIAU

1. Gambaran tentang staff / personil Humas Polda Riau

Bidang Humas adalah unsur pelaksana staf khusus Polda Riau yang berada di bawah Kapolda Riau yang jumlah personilnya 22 orang yang terdiri dari 4 orang PNS.

2. Sarana dan prasarana bidang Humas Polda Riau

Tabel 1.

Inventaris bidang Humas Polda Riau

NO	URAIAN	UNIT
01	Mobil dinas	2
02	Sepeda motor dinas	3
03	Komputer	4
04	Kamera	1
05	Handycam	1
06	Toa	1
Jumlah		12

(Sumber : Dokumen bidang Humas Polda Riau)

3. Pangkat-pangkat dalam kepolisian

Tabel 2.
Pangkat-pangkat dalam kepolisian

NO	PANGKAT	URAIAN	GOL
01	JENDERAL	JENDERAL	
02	KOMJEN	KOMISARIS JENDERAL	
03	IRJEN	INSPEKTUR JENDERAL	
04	BRIGJEN (Polda)	BRIGADIR JENDERAL	
05	KOMBES POL	KOMISARIS BESAR POLISI	
06	AKBP (Humas)	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	IV B
07	KOM POL	KOMISARIS POLISI	IV A
08	AKP	AJUN KOMISARIS POLISI	III
09	IPTU	INSPEKTUR SATU	III
10	IPDA	INSPEKTUR DUA	III
11	AIPTU	AJUN INSPEKTUR SATU	II
12	AIPDA	AJUN INSPEKTUR DUA	II
13	BRIPKA	BRIGADIR KEPALA	II
14	BRIGADIR	BRIGADIR	II
15	BRIPTU	BRIGADIR SATU	II

16	BRIPDA	BRIGADIR DUA	II
17	ABRIG	AJUN BRIGADIR	II
18	ABRIPTU	AJUN BRIGADIR SATU	II
19	ABRIPDA	AJUN BRIGADIR DUA	II
20	BHARAKA	BHAYANGKARA KEPALA	I
21	BHARATU	BHAYANGKARA SATU	I
22	BHARADA	BHAYANGKARA DUA	I

(Sumber : Dokumen bidang Humas Polda Riau)

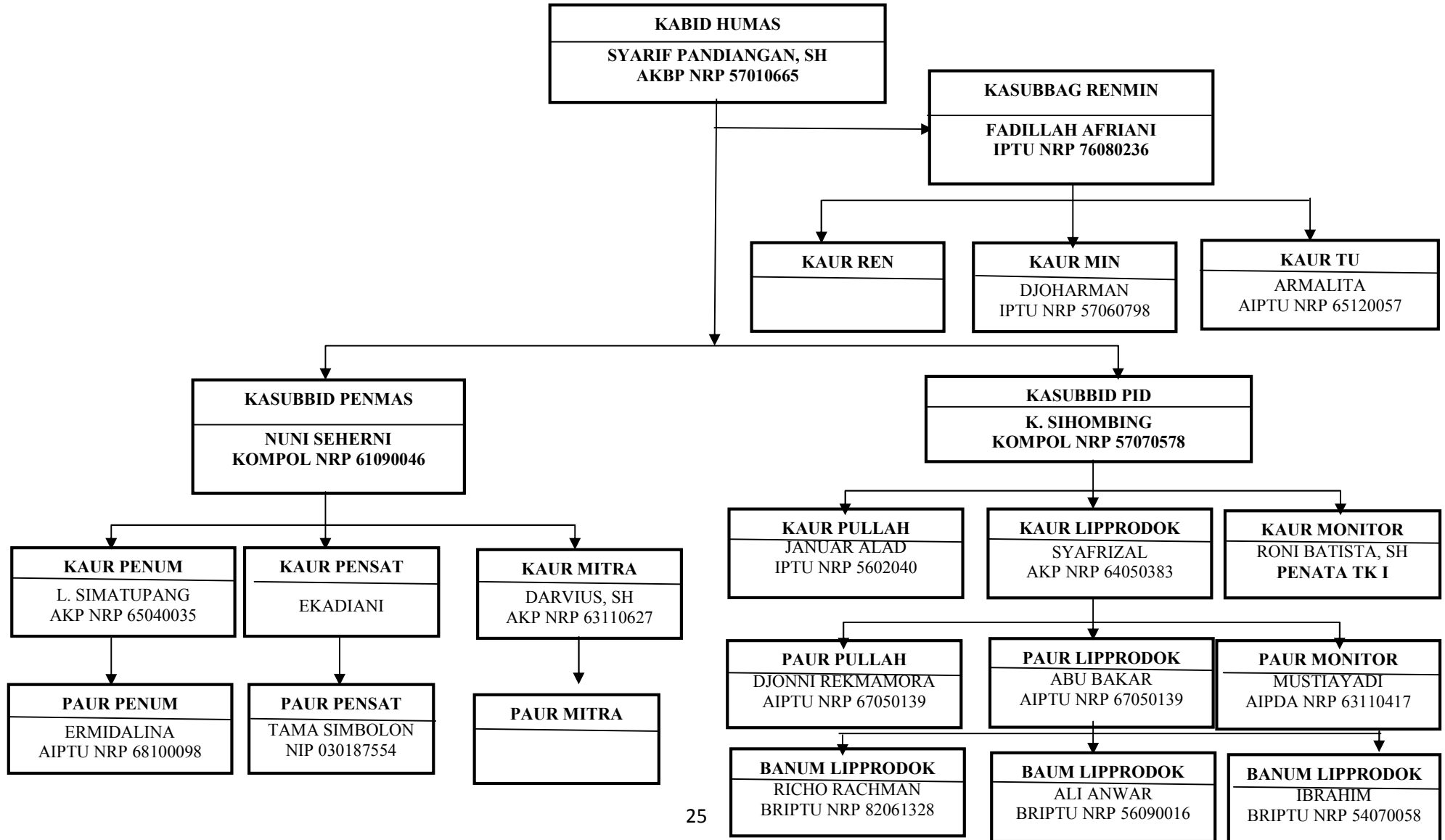
KETERANGAN :

1. JENDERAL - BINTANG IV
2. KOMJEN - BINTANG III
3. IRJEN - BINTANG II
4. BRIGJEN - BINTANG I
5. KOMBES POL - BUNGA MELATI III
6. AKBP - BUNGA MELATI II
7. KOMPOL - BUNGA MELATI I
8. AKP - BALKOK III KUNING
9. IPTU - BALOK II KUNING
10. IPDA - BALOK I KUNING
11. AIPTU - KELELAWAR I

- | | |
|--------------|----------------------|
| 12. AIPDA | - KELELAWAR II |
| 13. BRIPKA | - BENGKOK KUNING IV |
| 14. BRIGADIR | - BENGKOK KUNING III |
| 15. BRIPTU | - BENGKOK KUNING II |
| 16. BRIPDA | - BENGKOK KUNING I |

4. Struktur organisasi Humas Polda Riau

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG HUMAS POLDA SIAU



BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bab ini penulis akan menguraikan data-data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan di Humas Polda Riau yaitu, Kabid Humas dan staff Humas Polda Riau.

Data informan yang penulis ambil 10 orang dari 22 orang data primer penelitian, karena sudah mewakili dari keseluruhan data primer penelitian.

Tabel 3.

Data informan bidang Humas Polda Riau

No	Nama	Jabatan	Pangkat
1	SYARIF PANDIANGAN, SH	KABID HUMAS	AKBP
2	FADILLAH AFRIANI	KASUBBAG RENMIN	IPTU
3	NUNI SUHERNI	KASUBBID PENMAS	KOMPOL
4	KAYA SIHOMBING	KASUBBID PID	KOMPOL
5	L. SIMATUPANG	KAUR PENUM	AKP
6	RONI BATISTA, SH	KAUR MONITOR	PNS
7	TAMA SIMBOLON	PAUR PENSAT	PNS
8	ABU BAKAR	PAUR LIPRODOK	AIPTU
9	FARIDA PUSVITA DEWI	OPERATOR	PNS
10	EVA SUSANTI Nst	OPERATOR	HONORER

(Sumber : Dokumen Humas Polda Riau)

A. Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi di Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu responden di Bidang Humas Polda Riau

Syarif Pandiangan mengatakan, “Melihat kepada organisasi Polri telah berkembang pesat guna dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat di bidang keamanan, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan sesuai dengan visi yang diemban. Adalah menjadi kewajiban kami memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas fungsi serta

kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas. Seiring dengan itu jajaran Polri juga menjadi salah satu sumber informasi penting bagi masyarakat, khususnya di tengah derasnya arus tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012)

Berdasarkan wawancara berikut juga dijelaskan

Nuni Suhermi mengatakan, “Mengacu kepada UU No. 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Polri selaku salah satu badan publik merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan menata struktur organisasi, instrumental dan kultur serta mindset segenap anggota Polri untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga diharapkan akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Adapun aktivitas yang paling utama yang dilakukan oleh Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau menyampaikan hal yang berkaitan dengan pencitraan Polda kepada publik internal dan eksternal” (Wawancara dengan kasubbid penmas, 22 April 2012).

Berdasarkan wawancara berikut juga dijelaskan

Tama Simbolon mengatakan, “Publikasi kegiatan Polda Riau kepada publik internal dan publik eksternal dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pimpinan redaksi media yang ada di Riau, baik cetak maupun elektronik. termasuk kerjasama/kemitraan dengan media massa berikut komponennya dalam rangka membentuk opini masyarakat bagi kepentingan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk : *Penerangan pasukan*, Dilaksanakan dalam bentuk pembuatan majalah Tuah Sakti sebagai sarana informasi kepada seluruh personel Polda Riau dan jajarannya tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Riau maupun Satwil, *Penerangan masyarakat*, Dilaksanakan dalam bentuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang setiap laporan yang disampaikan kepada Polri tentang tindak lanjut laporannya agar masyarakat memahami sejauh mana penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, *Peliputan berita*, Dilaksanakan dalam bentuk meliput setiap kegiatan polri/masyarakat sebagai bahan informasi kepada seluruh personel Polda Riau dan Jajarannya, *Biaya Reproduksi*, Dilaksanakan dalam bentuk reproduksi seluruh kegiatan Polda Riau dan Jajarannya sebagai bukti dalam kegiatan Polda Riau, *Pengadaan barang pakai habis*, Dilaksanakan dalam bentuk penyediaan/pengadaan peralatan pakai habis untuk mendukung kegiatan Bid Humas Polda Riau dalam meliput setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh personel, *Pembinaan Wartawan*, Dilaksanakan dalam bentuk pembinaan wartawan agar berita yang dimuat tentang tugas kepolisian sesuai dengan fakta dilapangan dan sebagai jaringan humas untuk

membantu memberikan informasi kegiatan yang dilaksanakan polri dan tidak dapat diliput oleh Bid Humas” (Wawancara dengan Paur Pensat, 26 April 2012).

Dalam menjalankan aktivitas Humas, Bidang Humas Polda Riau Melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat melalui pengolahan dan penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media masa dan melaksanakan anev kegiatan tugas Humas.

Adapun aktivitas Humas Bidang Humas Polda Riau secara umum sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan dilingkungan Polda Riau
2. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi serta kerjasama dan kemitraan dengan media massa
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polda Riau
4. Peliputan, pemantaaun, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam dan pengurusan personil dan logistik dilingkungan Bid Humas
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bid Humas (Dokumen bidang Humas Polda Riau).

Guna meningkatkan peran dari berbagai pihak, yang karena kewajiban menurut kepentingannya mempunyai hubungan fungsional didalam mencapai tujuan kehumasan tersebut maka untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan frekwensi hubungan dan tata cara kerja satu sama lain perlu adanya HTCK yang mengatur hubungan dan tata cara kerja dilingkungan intern Polda Riau maupun ekstern Polda Riau dengan Bidang Humas Polda Riau (Polda dan Satuan di Kewilayahan).

1. Bidang Perencanaan Opsnal

- a. Berdasarkan Program Kerja Polda Riau, kebijaksanaan Kapolda dan pembina fungsi humas, Kabid Humas merencanakan program kegiatan operasional dan pembinaan fungsi humas dilingkungan Polda.
- b. Dalam merencanakan program dan kegiatan bidang operasional fungsi humas, Kabid Humas mengkoordinasikan dengan rencana program kerja dan kegiatan dari Dir Bidang Operasional / Ka Satuan Kewilayahan dan Ka lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. Dalam menyusun rencana program kegiatan fungsi Humas, Kabid Humas dibantu unsur staf yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kasubbag Renmin.
- d. Dalam menyiapkan perencanaan program kegiatan bidang opsnal, Kaur Ren mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dengan Subbid Penmas dan Subbid PID.

2. Bidang Perencanaan Administrasi

- a. Kabid Humas menyiapkan rencana program pembinaan fungsi penerangan yang meliputi administrasi personel, logistik, anggaran, pendidikan, sistim organisasi dan pengawasan staf pelaksana dan pelayanan fungsi humas.
- b. Dalam menyiapkan analisa dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran humas, Kasubbid Penmas dan Kasubbid PID sebagai unsur pelaksana fungsi humas, menyiapkan data-data dan berkoordinasi dengan kasubbag Renmin.
- c. Kasubbid Penmas dan Kasubbid PID membantu Kabid Humas dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi baik yang menyangkut aspek pelaksanaan maupun pembinaan fungsi humas yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari hasil koordinasi dengan unsur operasional / kewilayahan.

3. Pelaksanaan dan Bimbingan Teknis

- a. Kabid Humas dalam melaksanakan / menyelenggarakan kegiatan operasional kehumasan dibantu Subbid Penmas dan Subbid PID.
- b. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kasubbid Penmas dan Kasubbid PID bertanggung jawab kepada Kabid Humas.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, Kabid Humas selalu menjaga hubungan koordinasi dengan Dir Opsnal, Pembina fungsi dan para Kasatwil.

- d. Kabid Humas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsi Humas dilingkungan Polda berdasarkan kebijaksanaan Kapolda dan Pembina fungsi.
- e. Kabid Humas melaporkan hasil Anev pelaksanaan tugasnya pada setiap bulan, semester dan tahunan kepada Kapolda melalui Wakapolda dengan memberikan tembusan ke Div Humas Polri.
- f. Kasubbid Penmas sebagai staf pelaksana Kabid Humas Polda dalam menyelenggarakan / melaksanakan operasi / kegiatan humas kepada masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan, pengarah, petunjuk dan ketentuan yang ada di Bidang Humas. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini Kasubbid Penmas menyelenggarakan hubungan dan koordinasi dengan :
 - 1) Unsur pelaksana fungsi-fungsi operasional dan pembinaan serta kesatuan kewilayahan dalam rangka pengumpulan, pencarian dan peliputan data/kejadian aktual tentang kegiatan Polri.
 - 2) Unsur potensi pemerintah daerah/pusat, swasta serta potensi lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang humas dan media massa daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas operasional Polri yang positif bagi Polri.
 - 3) Unsur organisasi kewartawanan / pers / penerbitan video/audio, stasion radio dan TV, wartawan, penulis, artis dalam rangka pembinaan/penggalangan hubungan baik dan mengajak berpartisipasi di bidang humas, kamtibmas dan pembinaan opini yang positif bagi Polri.
 - 4) Kasubbid PID sebagai staf pelaksana Kabid Humas Polda menyelenggarakan / melaksanakan peliputan, monitoring produksi dan dokumentasi semua informasi / pemberitaan yang berkaitan dengan tugas Polri.

4. Hubungan Keluar / Antar Instansi

- a. Kabid Humas dapat berhubungan dengan instansi lain yang terkait dalam rangka menyelenggarakan kerjasama bidang kehumasan.
- b. Dalam rangka pelaksanaan fungsi humas, para Dir / Kapolresta / Res dapat menyelenggarakan pers release, wawancara pers, talk show, penjelasan pers atas perintah/izin/petunjuk Kapolda untuk mengcounter pemberitaan yang menyudutkan atau yang merugikan dan yang menjelaskan kebijaksanaan Kapolda dengan didampingi oleh Kabid Humas Polda atau Perwira yang ditunjuk.
- c. Para Dir / Kasatwil melaksanakan fungsi humas sebagai fungsi yang melekat pada pimpinan diseluruh jajaran Polda.
- d. Kabid Humas meliput / memonitor kegiatan operasi yang sedang berlangsung dan menampung hasil pelaksanaan tugas dari unsur operasional maupun unsur pembinaan di jajaran Polda untuk digunakan sebagai bahan informasi.
- e. Kabid Humas Polda pada saat-saat tertentu dan atau mendesak dapat secara khusus mengadakan hubungan koordinasi dengan Kadiv Humas Polri, Muspida, Pimred yang terkait dalam rangka pembinaan humas.
- f. Dalam hal menyangkut tugas humas yang dinilai mempunyai bobot Nasional dan atau menyangkut kepentingan Pusat, Kabid Humas segera melaporkan masalahnya kepada Kapolda dan Kadiv Humas

Polri untuk ditingkatkan langkah penanganannya pada tingkat Mabes Polri.

5. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Kapolda adalah pengawas dan pengendali umum pelaksana ditingkat kewilayahan masing-masing.
- b. Kabid Humas Polda melakukan pengawasan melekat dan sehari-hari mengendalikan pelaksanaan fungsi jajaran Polda Riau.

6. Penataan Jalur Administrasi

- a. Kabid Humas Polda melaksanakan administrasi umum sesuai dengan Petunjuk Jukminu yang berlaku.
- b. Jalur surat menyurat menggunakan sistem satu pintu yang diatur sebagai berikut :
 - 1) Kabid Humas atas nama Kapolda menanda tangani surat-surat keluar dengan tembusan kepada Kapolda / Wakapolda sebagai laporan, dalam hal-hal tertentu dan prinsipil ditandatangani oleh Kapolda.
 - 2) Kasubbid Penmas dan Kasubbid PID atas nama Kabid Humas dapat menanda tangani surat-surat keluar dilingkungan Polda khususnya yang menyangkut bidang tugasnya dalam hal aspek pembinaan.
- c. Kabid Humas Polda membuat laporan bulanan dan tahunan atas nama Kapolda kepada Kapolri Up Kadiv Humas Polri sebagai pembina fungsi (Dokumen bidang Humas Polda Riau).

B. Kegiatan yang dilakukan Humas Polda Riau yang menunjang untuk mensukseskan Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau

Berdasarkan teori yang dipaparkan pada Bab I yang menghasilkan konsep operasional sebagai tolok ukur dalam penelitian ini, maka akan disajikan data yang ada pada indikator-indikator aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misinya.

1. Adanya sosialisasi kegiatan Polda Riau kepada masyarakat

Syarif Pandiangan mengatakan, “Dalam melakukan sosialisasi kegiatan Polda Kepada masyarakat, kami terlebih dahulu kami menjalin hubungan dengan beberapa media massa yang ada di Riau baik media cetak maupun media elektronik seperti berlangganan dengan Riau Pos, Pekanbaru MX, Pekanbaru Tribun, Metro Riau, Halun Riau, TVRI, RRI, Smart FM dan juga publikasi melalui dunia maya (internet). Dalam penyebaran informasi tentang kebijakan Polisi yang sesuai dengan UU Kepolisian dan Visi Misi Polda Riau kami akan selalu mempublikasikan kegiatan-kegiatan Polda Riau kepada masyarakat, seperti tindakan para anggota baik kasus yang terjadi dalam lingkungan internal maupun eksternal Polda. Meskipun ada Polisi yang berkasus, kami tetap mempublikasikan melalui media massa tersebut dengan tujuan agar Polisi yang lain bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Selain itu kami juga melakukan dialog interaktif dengan media tersebut” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012).

Nuni Suherni juga mengatakan, “kami juga menyampaikan kegiatan-kegiatan positif Humas kepada masyarakat guna untuk meningkatkan citra Kepolisian. Selain itu, untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat juga mempublikasikan informasi tentang pengumuman tentang pembukaan penerimaan anggota yang ingin mendaftar menjadi Polisi. Seperti pendaftaran SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) pada setiap tahun dan sesuai dengan gelombangnya. Sehingga dari publikasi tersebut bagi sarjana-sarjana yang bersumber dari masyarakat bisa mengikuti pendaftaran sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh pihak Kepolisian khususnya di Polda Riau. Sehingga dengan demikian masyarakat akan mengetahui bahwa dalam kepolisian itu tidak ada penutupan informasi dan yang ada adalah keterbukaan informasi atau transparansi bagi siapapun yang ingin mendaftar asal sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan” (Wawancara dengan Kasubbid Penmas Polda Riau, 11 April 2012).

2. Adanya kegiatan Polda Riau dari bidang penerangan satuan

Humas polda Riau selain melakukan publikasi ke luar juga melakukan ke dalam atau internal publik yang bertujuan untuk memberikan penerangan kepada setiap anggota dalam menjalankan tugas dan juga sebagai acuan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh anggota Polisi yang dalam hal ini dilaksanakan kegiatan Humas bidang penerangan satuan.

Syarif Pandiangan mengatakan, “Dalam kegiatan Humas ada bidang penerangan satuan yang ditujukan kepada internal publik bertujuan untuk pencerahan berupa arahan dari masing-masing pimpinan dalam setiap bidangnya. dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang akan dilakukan yaitu : komunikasi tatap muka, pembuatan leaflet, booklet, penerbitan bulletin penerangan satuan, dan penerbitan media komunikasi internal. (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012).

Sedangkan Tama Simbolon mengatakan, “Dalam penyampaian informasi untuk penerangan kepada internal publik atau anggota Polisi agar bisa berjalan dengan lancar maka kami akan mempersiapkan materi atau bahan pesan yang akan disampaikan, mempersiapkan tempat dan sarana prasarana pertemuan, mempersiapkan *Sound System*, mempersiapkan konsumsi (bila ada anggaran), mengiriimkan undangan, mempersiapkan daftar hadir, mengolah materi untuk pembuatan laflet, booklet, memilih dan membuat surat penunjukan kepada pihak ke-3 yang akan memproduksi laflet dan booklet, mempersiapkan sarana teknologi yang akan digunakan untuk pembuatan dan pendistribusian bulletin internal dan penerbitan media komunikasi internal. Dengan persiapan yang dipersiapkan secara sistematis tersebut pesan yang akan disampaikan melalui penerangan satuan ini bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik” (Wawancara dengan Paur Penerangan Satuan, 11 April 2012).

3. Penerbitan *Press Release* dan jumpa *pers*

Syarif Pandiangan mengatakan, “*Press Release* adalah berupa informasi atau pernyataan yang diberikan atau dikirim melalui media massa yang disampaikan dalam bentuk tertulis. Humas juga ada mnerbitkan *Press Release* dan juga mengadakan jumpa *pers* bertujuan untuk informasi tersebut betul-betul sampai kepada masyarakat. Setiap ada kasus baik itu kasus bencana alam, wabah dan kasus kriminal yang lain kami akan mengadakan jumpa pers bisa secara langsung ataupun melalui telpon. Kasus –kasus untuk dikirim melalui *Pers Release* itu terkadang tidak dipilah-pilah, karena kasus yang kecil bisa juga berdampak besar

bagi masyarakat. Kalau jumpa *pers* sangat penting diketahui masyarakat, seperti kasus penangkapan pelaku curas senjata api, setelah diketahui tidak ada lagi tersangka kami langsung jumpa *pers*” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2011).

Nuni Suherni juga mengatakan, “Untuk penyusunan dan pengiriman *Press Release* terutama sekali yang dilakukan mengumpulkan data dan mengolah data yang akurat, menggunakan bahasa biasa yang dapat dimengerti, penggunaan karakter antara 500-600 (paling banyak 2 halaman), menulis nama lengkap kesatuan dan alamat lengkap kesatuan, membuat judul dengan frasa pendek yang merangkum keseluruhan isi siaran pers, dan menjawab 6 pertanyaan kunci : apa, kapan, dimana, siapa (pelapor, saksi / korban, tersangka), bagaimana dan mengapa. Sehingga dengan penyusunan yang rinci seperti itu media bisa menafsirkan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman informasi” (Wawancara dengan Kasubbid Penmas, 11 April 2012).

4. Membangun Kemitraan

Syarif Pandiangan mengatakan, “Kemitraan sangat penting sekali dibangun di bidang Humas ini. Seperti badan koordinasi kehumasan, adalah salah bentuk pertemuan kehumasan lembaga Humas yang lain yang melaksanakan kegiatan koordinasi secara rutin untuk saling menyampaikan pesan maupun informasi. Banyak hal yang disampaikan oleh bako Humas dalam pertemuan tersebut sekaligus juga dibuka Tanya jawab sehingga dari pertemuan itu bisa saling mengetahui apa yang harus ditingkatkan oleh masing-masing bako humas. Selain melakukan koordinasi kehumasan bidang kemitraan juga menjalin kerjasama dengan dewan pers, kerjasama ini adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan ikatan atau perjanjian serta kesepahaman antara Polda dengan Dewan Pers dalam setiap penanganan persoalan maupun permasalahan atas pemberitaan media massa” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012).

5. Melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah

Syarif Pandiangan juga mengatakan, “kerjasama atau menjalin Hubungan dengan instansi pemerintah juga ada kami lakukan, seperti dengan kantor gubernur, kejaksaan tinggi yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan kemudian dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan seperti KAMTIBMAS, pembangunan dan lain sebagainya” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012).

Eva Susanti Nasution juga mengatakan, “Antara Humas Polda Riau dengan Instansi Pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk mengadakan pertemuan dan saling tukar informasi atau menyampaikan pesan sehingga dengan mudah ketika ditemukan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan bersama, intinya dalam pertemuan ini juga saling memberikan keuntungan antara Kepolisian dengan Pemerintah serta

meningkatkan Image kepolisian kearah yang lebih baik” (Wawancara dengan Honorer Humas Polda Riau, 11 April 2012).

6. Melakukan kerjasama dengan Tokoh (masyarakat, agama, pemuda, intelektual dan lain-lain).

Syarif Pandiangan mengatakan, “Humas terus melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh Riau baik adat atau budayawan. Kepolisian tidak boleh melawan budaya supaya masyarakat tidak membenci kepolisian tersebut. Dan juga ketika ada kepolisian mengadakan acara maka kami tidak akan pernah lupa untuk mengundang para tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat, seperti tokoh adat, masyarakat dan juga pemuda” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012).

Parida Pusvita Dewi juga mengatakan, “Dengan adanya kerjasama antara Humas dengan para tokoh-tokoh tersebut, masyarakat dari kalangan yang terendah pun bisa mengetahui bagaimana sebenarnya kepolisian ini dalam menjalankan tugas sesuai dengan Visi dan Misinya yang ada di kepolisian ini. Ketika mengundang tokoh tersebut maka kami akan menyampaikan melalui mereka bagaimana tugas kami kemudian tokoh itu juga menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga dengan saling menyampaikan itu maka terciptalah image dan kerjasama yang baik antara kepolisian dengan para tokoh” (Wawancara dengan PNS Humas Polda Riau, 11 April 2012).

C. Faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau

1. Faktor Pendukung

Menurut Syarif Pandiangan, “Dalam penyampaian informasi kepada publik undang-undang keterbukaan informasi dan juga media massa sangat membantu kita dalam penyampaian informasi sehingga aktivitas Humas ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Jadi media massa itu sangat besar perannya terhadap berjalannya aktivitas Humas ini dalam mewujudkan Visi Misi Polda Riau, karena Humas ini merupakan corong organisasi pihak Kepolisian terhadap masyarakat, tidak akan mungkin Personil Humas menyampaikan kegiatan-kegiatan Polda Riau kepada masyarakat dengan cara perorangan” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012).

Eva Suasanti Nasution mengatakan, “Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang setiap saat apalagi dalam mempublikasikan informasi sekarang tidak lagi mengenal keterlambatan dan juga faktor jauhnya tempat atau wilayah yang menerima informasi, seperti teknologi internet umpamanya, kita hanya mengupdate berita dan menginput berita atau informasi kedalam internet dan dengan waktu yang sangat cepat dan menyebar dengan sangat cepat kepada wilayah penerima informasi tersebut. Selain itu, fasilitas dari pemerintah pusat juga sangat mendukung sekali akan terlaksananya aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau, berikut fasilitas yang ada : Adanya mobil dinas Humas Polda Riau 2 unit, sepeda motor dinas Humas Polda Riau 3 unit, computer 4 unit, kamera 1 unit, handycam 1 unit, toa 1 unit dan juga banyak lagi fasilitas pendukung kegiatan yang sesuai dengan bidangnya. Di samping sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Humas Polda Riau ada faktor pendukung yang tak kalah penting perannya dalam menjalankan kegiatan Humas yaitu Pimpinan dan staf-staf yang ada di bidang Humas Polda Riau, baik itu staf dari personel, PNS dan honorer yang keseluruhannya sangat profesional menjalankan tugas yang sesuai dengan *job descriptions* yang telah disepakati” (Wawancara dengan Honorer Bidang Humas Polda Riau, 26 April 2012).

2. Faktor Penghambat

Syarif Pandiangan mengatakan, “Untuk faktor penghambat sebenarnya jangan sampai terjadi dalam Humas karena yang harus diciptakan itu kemajuan bukan hambatan. Untuk hambatan di Humas ini mungkin tidak banyak tapi ada, salah satunya media massa baik cetak atau elektronik terkadang bisa juga sebagai hambatan dalam penyampaian informasi, seperti terjadi kasus yang pada intinya belum waktunya untuk diberitakan tapi sudah diberitakan” (Wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau, 26 April 2012).

BERIKUT DATA DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG HUMAS
POLDA RIAU

PENERIMAAN TARUNA AKPOL



FOTO KEGIATAN SOSIALISASI DAN SUPERVISI
DIBIDANG KEHUMASAN
OLEH KADIV HUMAS POLRI BESERTA TIM
DI AULA BENGKALIS SPN PEKANBARU



KEGIATAN TATAP MUKA DAN KEMITRAAN
DI KANTOR RIAU POS PEKANBARU



KEGIATAN WAWANCARA LANGSUNG
DI RTV PEKANBARU



GIAT PRESS RELEASE



GIAT DOKUMENTASI KLLIPING BERITA

[illegible]

UNTUK KESELAMATAN BERLALU LINTAS

Chevron dan Polda Riau Teken *MoU*

PEKANBARU-Manajemen PT Chevron Pacific Indonesia dan petinggi Polda Riau menandatangani Kesepakatan Bersama untuk Program Aksi Kamitiran Keselamatan Jalan atau Road Safety Partnership Action atau RSPA tahap I di Kantor Dirantas Polda Riau, Pekanbaru, Kamis (7/6).

ERMA SRIMELYATI
Liputan Pekanbaru

Kugiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Padda Rina AKIP Budi Indra Darmawan SE, jajaran pimpinan Padda Rina, Manager Security Chevron Supriat, Manager Operational Excellence/Health Environment & Safety Cherron Agus Dhillan dan Manager Communications Chevron Tiva Permisa.

Tahun awal dari program R237A ini, John Tive Permatasusahkan survei di lokasi-lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di 41 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Survei ini dilakukan pada pertengahan Juni 2013. Lalu dilanjutlah dengan pertemuan bulat-bulat

dan BRTA untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Chlorine adalah unsur program RUSA yang diluncurkan melalui proyek kemitraan Lintas Negara dengan Lintas Negara (Expat) sebagai mitra pengembang teknologi, yaitu menyediakan jasa teknis, tenaga yang akan, akan, serta dan bahan. Pengiriman ini merupakan bentuk lain awal dari kerjasama bilateral kedua negara untuk meningkatkan ketahanan Lintas Negara di Provinsi Riau, yaitu sebagai bagian dari pembangunan wilayah penunjang kawasan Rantau Panjang.

Program yang akan berlangsung pada 2012-2013 ini akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

gama jahan raja tidak meng-
jauhkan kesempunan. Kesem-
punan, kesetiaan dan keber-
anian lalu lintas kemudi-
tanganlah di Pura ini. Bani
Sani raja membuat jalur
seperti di kompleks Cherson
sebagai lapangan yang ma-
luk ke seluruh itu akan ber-
laku terlihat sebagai dapat
menunjukkan angka kemudi-
tangan. Bani Raja AGIP Mudi Indra
Kemudi. S.K.

Belakangan ini, banyak kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Desember, seperti lomba-lomba, pameran, dan sebagainya. Untuk itu, perlu diadakan koordinasi antara instansi yang bersangkutan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

7. Hasil survei ini akan disusun dalam paragraf RUPA yang kemudian dimasukkan kepada para pemangku kebijakan masalah tata lita.

Inggrisnya berapapun pemerintahnya
dari pemerintahan RI/PA kepada
Kedua belah belah yang memiliki
posisi ini akan terlihat." (p. 10)

Programa ini mencakup pembangunan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan industri. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan komunikasi.

di tingkat kabupaten/kota provinsi Riau. Para peserta kegiatan berlangsung di aula gedung kantor pemerintah di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen HSPA dengan perpedaan pada Buku Panduan yang telah disusun oleh Tim HSPA Provinsi Riau." *Agencies*

Tatang kedua, selokotnya, hujungnya BSEPA dan panyembukan bukit pendirian BSEPA kepada panyambung hujungnya lalu lintas di tingkat hujungnya hujungnya di Provinsi Riau. Luncuran bukit pendirian direncanakan hujungnya dengan Forum Rapat Tahunan lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Riau.

"Berdasarkan hal-hal yang telah kami persilakan, kami sebagai RSPA di seluruh kabupaten/kota di provinsi Riau yang akan melaksanakan 2 kali testing. Kegiatan ini diharapkan akan

BAB IV

ANALISA DATA

Pada bab ini, penulis mencoba untuk menganalisa data yang telah disajikan pada Bab III dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu data akan di sajikan dalam bentuk kalimat dengan menggambarkan fenomena yang ada sehingga akan mendapatkan pemahaman. Data akan disajikan sesuai dengan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab I.

A. Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi di Kepolisian Daerah Riau

Humas Polda Riau merupakan suatu bagian yang terpenting yang berada di bawah Pimpinan Polda Riau, dimana Humas merupakan corong bagi Polda Riau dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan Humas atau aktivitas-aktivitas Humas Polda Riau bisa terpublikasi dengan baik dengan menggunakan alat dan fasilitas yang ada sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari data yang diperoleh dari informan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Humas Polda Riau merupakan salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi yang diemban oleh jajaran Polda Riau. Dapat dilihat dari bidang Humas sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat dalam penyampaian informasi kepada publiknya baik intern maupun publik eksternal. Maka dari itu, Humas juga tidak akan bisa menyampaikan informasi secara efektif kepada publik apabila tidak ada dibantu

oleh penyambung komunikasi seperti media komunikasi. Agar pesan itu bisa betul-betul terpublikasikan kepada publik, maka Humas tidak luput untuk menjalin hubungan baik dengan media massa yang ada di Riau ini khususnya. Dengan adanya hubungan baik yang dijalin oleh Humas dengan media massa seluruh kegiatan-kegiatan Humas dan informasi-informasi yang berkaitan dengan Polda Riau demi mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau bisa berjalan dengan baik. Diantaranya Humas Polda Riau dalam membentuk opini publik bagi kepentingan masyarakat adalah dalam bentuk *Penerangan pasukan*, Dilaksanakan dalam bentuk pembuatan majalah Tuah Sakti sebagai sarana informasi kepada seluruh personel Polda Riau dan jajarannya tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Riau maupun Satwil, *Penerangan masyarakat*, Dilaksanakan dalam bentuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang setiap laporan yang disampaikan kepada Polri tentang tindak lanjut laporannya agar masyarakat memahami sejauh mana penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, *Peliputan berita*, Dilaksanakan dalam bentuk meliput setiap kegiatan polri/masyarakat sebagai bahan informasi kepada seluruh personel Polda Riau dan Jajarannya, *Biaya Reproduksi*, Dilaksanakan dalam bentuk reproduksi seluruh kegiatan Polda Riau dan Jajarannya sebagai bukti dalam kegiatan Polda Riau, *Pengadaan barang pakai habis*, Dilaksanakan dalam bentuk penyediaan/pengadaan peralatan pakai habis untuk mendukung kegiatan Bid Humas Polda Riau dalam meliput setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh personel, *Pembinaan Wartawan*, Dilaksanakan dalam bentuk pembinaan wartawan agar berita yang dimuat tentang tugas kepolisian sesuai dengan fakta

dilapangan dan sebagai jaringan humas untuk membantu memberikan informasi kegiatan yang dilaksanakan polri dan tidak dapat diliput oleh Bid Humas

Adapun aktivitas Humas bidang Humas Polda Riau secara umum sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan dilingkungan Polda Riau
2. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengolahan dan penyampaian informasi serta kerjasama dan kemitraan dengan media massa
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan Polda Riau
4. Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam dan pengurusan personil dan logistic dilingkungan Bidang Humas
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan program Bidang Humas.

B. Kegiatan yang dilakukan Humas Polda Riau yang menunjang untuk mensukseskan Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau

Untuk menganalisa data indikator yang tertera dalam bab I dengan data yang sudah disajikan melalui wawancara dari informan penelitian, maka disini akan dianalisa sesuai dengan pengamatan penulis yang berlandaskan teori.

1. Adanya sosialisasi sosialisasi kegiatan Polda Riau kepada masyarakat

Dari data wawancara pada bab sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa Humas Polda Riau dalam kegiatannya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang ada di Propinsi Riau seperti Riau Pos, Pekanbaru MX, Pekanbaru Tribun, Metro Riau, Halun Riau, TVRI, RRI, Smart FM dan juga publikasi melalui dunia maya (internet). Dari berbagai media tersebut sosialisasi tentang kebijakan Polisi yang sesuai dengan UU Kepolisian dan Visi Misi Polda Riau akan dapat terpublikasi kepada masyarakat. Kemudian dialog interaktif dengan masyarakat juga berjalan lancar melalui media elektronik. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk menyampaikan kegiatan positif Humas kepada masyarakat guna untuk meningkatkan citra Kepolisian seperti transparansi tentang penerimaan pendaftaran SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) pada setiap tahun dan sesuai dengan gelombangnya. Sehingga dari publikasi tersebut bagi sarjana-sarjana yang bersumber dari masyarakat bisa mengikuti pendaftaran sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh pihak Kepolisian khususnya di Polda Riau dan juga sosialisasi kegiatan Polda yang lain.

2. Adanya kegiatan Polda Riau dari bidang penerangan satuan dalam pembuatan laflet dan booklet

Dari pernyataan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan, bahwa Humas Polda Riau mempunyai kegiatan Humas berupa penerangan satuan kepada internal publik, yaitu seluruh anggota Kepolisian diberikan arahan untuk memajukan dan mencapai kesuksesan dalam mewujudkan Visi Misi Polda Riau. Diantaranya pembuatan *House Journal* atau juga dalam bentuk laflet dan booklet, dimana dalam penerbitan yang dipersiapkan dalam bentuk tertulis dan tersusun yang berbagai macam jenis desain laflet dan booklet semua itu berisikan peraturan-peraturan atau UU yang ditujukan untuk anggota agar anggota bisa memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, juga berisikan kegiatan-kegiatan atau event yang pernah dilakukan oleh Polda Riau yang bertujuan untuk kedepannya bisa meningkatkan kinerja kepolisian ke arah yang lebih baik dan yang sesuai diharapkan pimpinan dan masyarakat.

3. Penerbitan *Press Release* dan jumpa *Pers*

Analisa peneliti dalam pernyataan ini, bahwa *Pers Release* dan konferensi pers merupakan kegiatan Humas Polda Riau yang bertujuan untuk mempublikasikan apapun yang terjadi di kepolisian daerah Riau, sehingga dengan adanya *Press Release* dan konferensi pers tersebut bisa memberikan makna kepada masyarakat akan transparansi yang dilakukan oleh Humas Polda Riau. Dalam penerbitan *Pres Release* dan jumpa pers Humas tidak memilah kasus yang terjadi pada lingkungan publiknya, baik internal maupun eksternal. setiap ada

kasus baik kecil maupun besar itu akan di lakukan konferensi pers, Karena kasus kecil bisa berdampak besar bagi masyarakat. Dan juga dalam kegiatan ini tidak luput dari perencanaan dan persiapan yang matang supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak melakukan kegiatan yang sia-sia.

Mengacu kepada tujuan *Press Release* dan jumpa Pers yaitu untuk memberikan informasi, berita, publikasi dan promosi, dan aktivitas Humas yang dianggap penting untuk diketahui secara luas oleh publik sasaran, yaitu yang menonjolkan segi pengenalan (*awareness aspect*). Selain itu, *Press Release* dan jumpa Pers bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang mungkin atau yang telah terjadi. Dan salah satu cara Humas menjelaskannya kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak *pers* / wartawan. Diharapkan penjelasan melalui media massa tersebut akan muncul saling pengertian dan saling menghargai (*mutual understanding and appreciation aspect*) di masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Dapat juga untuk meluruskan atau sekaligus membantah tentang suatu berita negatif yang telah tersiar di media massa (*make something to clear and objective*).

4. Membangun Kemitraan

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam kegiatan Humas itu dalam pencitraan memiliki bagian bidang kemitraan yang bertujuan untuk memberikan citra positif dengan pihak-pihak Humas yang lain seperti Humas pemerintahan, swasta, dan juga sampai kepada dewan Pers yang bertujuan untuk saling menyampaikan citra

perusahaan atau organisasi sehingga dengan itu bisa lebih meningkatkan citra dari masing-masing perusahaan atau organisasi oleh pihak Humas nya.

Dalam membangun kemitraan di bidang Humas Polda Riau itu tidak terlepas kepada hal yang berhubungan dengan citra organisasi. Karena penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik dan menguntungkan terhadap suatu citra lembaga / organisasi atau produk barang dan jasa pelayanannya yang diwakili oleh pihak Humas / PR. Biasanya landasan citra itu berakar dari “nilai-nilai kepercayaan” yang kongkretnya diberikan secara individual, dan merupakan pandangan atau persepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas, yaitu sering dinamakan citra.

5. Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Pemerintahan

Peneliti dapat menyimpulkan, dengan adanya kerjasama antara Humas Polda Riau dengan pemerintah bisa menghasilkan hubungan yang erat antara organisasi atau perusahaan dengan pemerintah, antara Polda Riau dengan pemerintah saling melakukan kerjasama dalam meningkatkan citra Polda dan Citra Pemerintahan daerah Riau yang dibuktikan dalam kerjasama KAMTIBMAS.

Suatu perkembangan penting dalam hubungan masyarakat terjadi dalam hubungan yang lebih erat antara perusahaan, asosiasi, dan perserikatan dengan pemerintah dan keterlibatan yang lebih besar dari lembaga-lembaga swasta dalam

permasalahan masyarakat. Kepentingan organisasi dan pemerintah menjadi satu dengan keuntungan mereka, dan suatu organisasi tidak menganggap pemerintah sebagai lawan tetapi sebagai mitra kerja.

6. Melakukan kerjasama dengan Tokoh (masyarakat, agama, pemuda, intelektual dan lain-lain).

Peneliti menyimpulkan bahwa peran suatu komunitas sangatlah penting dalam organisasi, karena dengan adanya hubungan yang baik antara organisasi dengan suatu komunitas bisa memeperkokoh organisasi tersebut. Begitu juga Polda Riau yang telah menjalin hubungan yang baik dengan beberapa komunitas atntaranya, dengan tokoh agama, adat, budayawan dan intelektual. Polda Riau tidak boleh melawan budaya yang ada pada suatu kalangan komunitas dan juga komunitas lainnya. Dalam menjalin Hubungan yang erat, setiap ada acara yang dilakukan oleh pihak kepolisian pasti tidak melupakan tokoh atau komunitas dalam mengundangnya.

Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun temurun. Orang –orang yang hidup dalam komunitas dan lembaga-lembaganya membuat mereka saling bergantung satu dengan lainnya. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang baik tanpa lembaga-lembaga tersebut begitu juga sebaliknya.

C. Faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Aktivitas Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau

1. Faktor Pendukung

Dalam mensukseskan aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas dan salah seorang staff Humas Polda Riau pada Bab sebelumnya, bahwa peraturan tentang keterbukaan informasi yang diemban oleh Bidang Humas merupakan faktor pendukung atas terwujudnya Visi Misi Polda Riau. Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi tersebut, maka Humas dituntut untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, media massa juga sangat besar perannya dalam mensukseskan aktivitas Humas. Humas tidak akan berperan aktif apabila dalam penyampaian informasi tidak ada kerjasama antara Humas dan media massa. Oleh sebab itu media juga termasuk faktor pendukung bagi Humas Polda Riau dalam menjalankan aktivitasnya.

Selain dari undang – undang keterbukaan informasi dan media massa, yang tak kalah penting adalah petugas-petugas yang profesional dalam bidangnya masing-masing dan juga sarana dan prasarana yang dijadikan Humas untuk menunjang kegiatan Humas Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misinya seperti yang sudah tertera dalam bab sebelumnya.

2. Faktor Penghambat

Untuk faktor hambatan mungkin tidak begitu besar kemungkinannya yang akan terjadi, sesuai yang disampaikan oleh syarif Pandiangan, media massa juga terkadang menjadi sedikit hambatan akan suksesnya kegiatan Humas Polda Riau, karena media massa itu bisa jadi ketika belum waktunya untuk diinformasikan suatu berita, tetapi informasi itu sudah disampaikan ke masyarakat banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Bab III dan analisis data pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa Aktivitas Humas dalam mewujudkan Visi dan Misi di Kepolisian Daerah Riau merupakan suatu kewajiban bagi Humas untuk menjalankan tugasnya dan sangat berpengaruh bagi instansi Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misinya. Dapat dilihat dari keberadaan Humas merupakan corong bagi Polda Riau dan sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Aktivitas Humas Kepolisian Daerah Riau sesuai dengan Visi sebagai pelayanan bagi masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kegiatan Polda Riau kepada masyarakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat demi keterbukaan informasi yang diatur sebagai UU di Kepolisian Daerah Riau. Banyak cara yang dilakukan Humas Polda Riau dalam mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat sehingga citra atau tanggapan masyarakat terhadap Instansi Polda Riau baik di mata masyarakat, antaranya dialog interaktif antara Pihak Polda dengan Masyarakat yang dipublikasikan dengan komunikasi satu arah melalui media komunikasi.
2. Demi tercapainya Visi dan Misi Polda Riau pihak Humas memberikan penerangan kepada *Internal Public* atau kepada anggota Polisi suatu penerangan satuan yang bertujuan untuk kesepahaman dalam

menjalankan tugas dibidangnya masing-masing. Dalam penerangan satuan tersebut banyak cara untuk menyampaikan arahan kepada seluruh anggota, antaranya dengan melakukan komunikasi tatap muka yang berisikan pesan-pesan yang menunjang kepada kinerja, ada juga arahan yang tertulis dalam bentuk leaflet dan booklet yang berisikan Undang-undang atau peraturan yang akan dilaksanakan.

3. Penerbitan *Press Release* dan jumpa pers merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat yang terpercaya dalam menyampaikan pesan. Kasus ini tidak pandang bulu, meskipun anggota yang bermasalah, namun tetap diinformasikan kepada masyarakat.
4. Demi mencapai citra positif, membangun kemitraan merupakan hal yang paling akurat dibangun oleh pihak Humas Polda Riau dengan instansi-instansi yang berpengaruh terhadap citra Polda Riau. Dengan adanya hubungan yang membangun kemitraan tersebut dapat saling menguntungkan antara suatu pihak dengan pihak yang lain dengan menciptakan kerjasama yang baik.
5. Masyarakat sangat membutuhkan pemerintah demi tercapainya kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupannya. Dengan adanya Humas Polda Riau menjalin hubungan atau kerjasama yang baik dengan pemerintah, sehingga program KAMTIBMAS (keamanan ketertiban masyarakat) yang diciptakan Polda Riau bisa membantu pemerintah

dalam mengabulkan harapan masyarakat akan terciptanya keamanan, ketertiban dalam kehidupan.

Jadi Humas Polda Riau dalam menjalankan aktivitasnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau memiliki berbagai kegiatan yang sesuai dengan apa yang ditargetkan dan disusun dalam program yang telah dibuat oleh pihak Humas tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Humas Polda Riau yaitu :

1. Humas Polda Riau diharapkan mempertahankan, meningkatkan serta mengevaluasi terus aktivitas yang dilakukan dalam mewujudkan Visi dan Misi Polda Riau sebagai Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia.
2. Diharapkan kepada seluruh staff bidang Humas lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan aktivitas Humas Polda Riau sehingga peran Humas sebagai corong dan pelayan bagi masyarakat benar-benar ada dalam kacamata masyarakat.
3. Dengan berjalannya aktivitas Humas dengan baik, diharapkan transparansi kepada Internal *Public* dan *Eksternal Public*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro linggar. 2001. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Anggoro Linggar. 2002. *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Burhani dan lawrens, hasbi. 2000. *Kamus ilmiah populer*. Jombang : Lintas Media
- Divisi Hubungan Masyarakat Polri. 2010. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Humas Di Jajaran Polri*. Jakarta : Mabes Polri
- Effendi, Onong Uchjana.2002. *Hubungan Masyarakat Studi Komunikologis*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Humas Polda Riau. 2011. *Hubungan Tata Cara Kerja Bidang Humas Polda Riau*. Pekanbaru.
- Moore, Frazier.1988. *Hubungan Masyarakat prinsip, kasus, dan masalah*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- P, Siagian, Sondang. 1995. *Analisis Perumasan Kebijakanaksanaan Dan Strategi Organisasi*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung
- Ruslan, Rosady. 2005.*Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ruslan, Rosyadi. 2007.*Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Scott, Allen, Glen. 2006. *Efective Public Relations edisi Sembilan*. Jakarata:
Perdana Media Group.

Widjaja. 2008. *Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara